PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja | Hari: Sabtu | Tanggal: 08 Mei 2021 | Halaman: 1

▸ ANTISIPASI PERSEBARAN COVID-19

Pemda DIY Kesulitan Larang Mudik Lokal

Ujang Hasanudin & Sirojul Khafid
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Pemda DIY mengaku kesulitan menerapkan aturan larangan mudik lokal. Jika aturan itu sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat, Pemda DIY akan mengikutinya.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan sampai saat ini Pemda DIY belum menerima regulasi larangan mudik lokal secara tertulis dari Pemerintah Pusat atau dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nasional. Ia baru mengetahui larangan tersebut dari media massa. Namun Baskara Aji mengaku kesulitan menrapkan aturan tersebut.

"Bagimana kami membatasi orang dari Bantul ke Kota. *Dalane ana pira* [jalannya saja ada berapa], yang jalan kaki saja bisa. Terus terang kalau itu dilaksanakan sulit," kata Baskara Aji, di kompleks Kepatihan, Jumat (7/5).

Pemda DIY tidak mungkin menjaga di semua pintu masuk dan keluar antarkabupaten. Alasannya dari sisi jumlah petugas juga terbatas. Selain itu, antarkabupaten dan kota juga hampir tidak ada batasnya. "Kan bukan hanya jalan saja batasnya, lorong-lorong juga ada," ujar dia.

"Mungkin kalau Kulonprogo kita lebih mudah [membatasi], tapi Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kota enggak bisa dibatasi."

▸ Halaman 6

Pemda DIY...

"Hanya Kulonprogo [yang bisa dibatasi], kecuali dia renang saja begitu [renang di Sungai Progo]. Kalau yang lain tiga kabupaten satu kota rasanya sulit dibatasi," ujar Baskara Aji.

Namun demikian Pemda DIY akan mencari celah jika regulasi tersebut sudah menjadi keputusan. Jika regulasi tersebut bentuknya imbauan, Gubernur DIY, kata Baskara Aji, kemungkinan akan mengeluarkan kebijakan lanjutan. Namun jika dalam bentuk larangan akan dilaksanakan semaksimal mungkin.

Salah satunya bekerja sama dengan kalurahan dan RT/RW untuk mengatur warganya yang keluar masuk dari rumah. "Kalau itu memang keharusan kami akan sampaikan ke lurah, RT/RW untuk membatasi supaya pada saat keluar dari RT/RW sudah ada rambu-rambu karena tidak boleh keluar," ujar Baskara Aji.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Pusat resmi melarang semua jenis mudik selama masa larangan mudik dari 6-17 Mei 2021. Larangan mudik tersebut juga berlaku bagi daerah aglomerasi, termasuk DIY yang sebelumnya sempat diizinkan atau dibolehkan mudik lokal.

Masih Mengkaji

Sementara itu, Pemerintah Kota Jogja masih mengkaji larangan mudik lokal. Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, belum mendapat keterangan tertulis tentang teknis kebijakan ini dari Pemerintah Pusat. "Kami belum tahu tentang kebijakan yang sangat teknis dan mendadak ini. Kami belum tahu aglomerasi seperti Jogja yang menjadi pusat ibu kota, pusat aktivitas ekonomi, sosial, politik yang pekerjanya dari kabupaten sekitar," kata Heroe, Jumat.

Heroe masih menelusuri kebijakan ini, apakah ada keterangan tertulis atau lainnya. Lantaran pada larangan mudik 6-17 Mei 2021, masih banyak pekerja yang belum libur. Sementara para pekerja sektor logistik banyak yang berasal dari Sleman, Bantul, Gunungkidul, atau Kulonprogo. "Apakah langsung libur atau seperti apa, kami masih menelusuri kebijakan ini," kata Heroe. "Kami tunggu aturan teknis yang benar seperti apa."

Sebagai gambaran, aglomerasi merupakan kota atau kabupaten yang berada dalam kawasan pengembangan wilayah perkotaan. Meski Pemerintah Pusat telah melarang mudik, kegiatan ekonomi di wilayah aglomerasi masih diperbolehkan. Jogja dan empat kabupaten di Provinsi DIY termasuk satu dari delapan wilayah aglomerasi yang diperbolehkan lakukan aktivitas ekonomi.

Tak Efektif

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai larangan mudik yang diberlakukan sejak awal memang sudah tidak efektif. Ia menganggap larangan mudik di wilayah aglomerasi ini juga tak bakal efektif mengingat banyaknya pekerja dari luar Jakarta.

"Enggak akan efektif itu. Apalagi ada aglomerasi. Lha gimana mau efektif ada yang kerja di Jakarta tapi rumah di Depok, rumah di Bekasi. Ya enggak bisalah. Yang bisa itu kantornya tutup," kata Agus saat dihubungi, Jumat.

"*Gimana* yang kerja di toko, di restoran kan enggak bisa dia harus masuk," ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan (*policy*) harus dianalisa dengan baik. Namun, dia melihat kebijakan larangan mudik lokal ini tidak jelas. "*Policy* itu harus dilakukan lewat analisa yang baik. Maksudnya enggak jelas. Tapi membuat susah orang. Kan kebijakan itu dibuat oleh negara supaya orang mudah melakukan kegiatan sehari-hari," ungkapnya.

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyebut kebijakan larangan aglomerasi ini jelas. Namun visibilitasnya tak memadai. Sebab, saat ini sudah H-7 Lebaran. "Kebijakannya jelas. Cuma visibilitasnya enggak memadainya. Karena ini sudah H-7," kata Dicky.

Menurutnya larangan mudik lokal ini sukar diterapkan. "Enggak mungkin kita melakukan ini *tuh*. Efektivitasnya kecil. Karena banyak yang pasti melanggar. Padahal yang harus dilakukan mitigasi saja. Selain terus mempersuasi penduduk," ujarnya. **(Detik)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005